



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya regulasi baru yang mengatur mengenai perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

13. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 26 TAHUN 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang merupakan unsur Pemerintah Daerah, yang membantu tugas Kepala Daerah berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan
9. Unit Kerja adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian dari SKPD seperti UPTD atau Bagian.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Sekertaris Daerah, Sekertaris DPRD,

Sekertaris KORPRI, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktorat RSUD dan Kepala Kantor.

11. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan eselonering yang memiliki wewenang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
13. Kepala Kantor adalah Pejabat Eselon III/a yang memimipin Satuan Kerja Mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
14. Pejabat Struktural lainnya adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV/a dan IV/b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
15. Staf adalah Pegawai Negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional teknis/umum maupun staf yang tidak menduduki jabatan fungsional teknis/umum.
16. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
17. Non PNS/Masyarakat adalah Pegawai Tidak Tetap/Honorar Daerah/ masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Bone Bolango.
18. Tenaga Ahli/Advokasi Pemerintah Daerah adalah tenaga ahli di bidang hukum non PNS yang disetarakan dengan PNS Golongan IV non Jabatan.
19. Ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah Pegawai TNI dan POLRI yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah yang disetarakan dengan PNS Golongan yang bersesuaian.
20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di angkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kuasa BUD adalah PNS di lingkungan PPKD yang diangkat dan bertindak membantu tugas-tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
22. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fuingsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

24. Surat perintah tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Telaahan Staf adalah naskah dinas dan bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
27. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Lainnya dan dilakukan apabila sarana komunikasi yang tersedia mampu memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, kesesuaian program dan kegiatan, serta ketersediaan anggaran atas perintah Pejabat yang berwenang.
31. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
32. Lumpsum adalah semua biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk uang makan, uang saku dan transpor lokal.
33. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

BAB II TUJUAN PENETAPAN

Pasal 2

Tujuan penetapan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango adalah Peraturan ini meliputi :

- a. Terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaan belanja perjalanan dinas;
- b. Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efektifitas dan efisiensi serta sinkronisasi antara anggaran dan pencapaian target pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Kepala Daerah;
 - b. Tingkat B untuk Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Eselon II/Anggota DPRD;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - f. Tingkat F untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I/II/Masyarakat (Non PNS).
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat dan PNS pada lembaga lainnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat/golongannya;
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi masyarakat/Non PNS disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- (4) Untuk kepentingan protokoler, Ajudan Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- (5) Biaya perjalanan dinas untuk istri Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, III dan IV yang terlibat dan atau dipekerjakan pada lembaga lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Istri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- b. Istri Sekretaris Daerah disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. Istri Pejabat Eselon II disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- d. Istri Pejabat Eselon III dan IV disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- e. Penggunaan biaya perjalanan dinas disesuaikan pada sumber dana dan peruntukannya yang berkaitan langsung dengan kegiatan lembaga terkait.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. Uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Uang makan; dan
 - b. Uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biaya tiket pesawat udara/kapal laut/kereta api/bus keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal bus keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum;
- (6) Perhitungan biaya penginapan adalah $n-1$, jumlah hari perjalanan menurut SPT dikurangi 1 (satu) hari;
 - (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;
 - (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD;
 - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak;
 - (10) Uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
 - a. Uang transport dari tempat kedudukan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus;
 - b. Uang transport dari bandara/pelabuhan/ stasiun/terminal bus ke penginapan;
 - c. Uang transport dari penginapan ke bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus;
 - d. Uang transport dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal bus ke tempat kedudukan;

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas untuk lembaga lainnya, masyarakat, serta PNS, Eselon II, III, IV, Staf serta ajudan Pejabat Negara mendapat uang lumpsum harian sesuai dengan tingkat perjalanan dinas dalam pasal 3 ayat (1);
- (2) Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ke tiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga maka biaya yang diberikan adalah bagian biaya di luar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung oleh pihak ke tiga;
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana SPPD mendapat biaya penginapan 1 (satu) hari menjelang kepulangan dan uang harian sesuai jumlah hari pada SPT;

- (4) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pos belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf (Non Struktural/Fungsional serta Non PNS) pada SKPD, wajib diajukan melalui telahaan staf dan disetujui oleh Kepala SKPD;
- (3) Pengajuan telahaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat undangan/permintaan yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD, yang substansi disposisi memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV Pejabat fungsional dan Staf (non Struktural/Fungsional, Non PNS) yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD;
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah;
- (3) SPT dan SPPD bagi Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, Staf Khusus/ Fungsional Sekretaris Daerah, Tenaga Advokasi/ Ahli Pemerintah Daerah dan Staf (Non Struktural/Fungsional, Non PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau apabila Sekretaris Daerah

berhalangan didelegasikan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan/atau Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- (4) SPT dan SPPD bagi Kepala SKPD dan Pejabat Fungsional utama lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (5) Untuk belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan secara berombongan oleh Pejabat dan Staf, SPT dapat dibuat dalam satu SPT yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Perhitungan jangka waktu hari pelaksanaan perintah tugas perjalanan dinas dalam SPT ditetapkan oleh Pejabat yang menandatangani SPT tersebut.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 9

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah diberlakukan secara lumpsum (termasuk biaya transportasi PP), didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen :

- a. Telaahan Staf atau surat undangan/permintaan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan
- b. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan

pemeriksaan, laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara administratif difasilitasi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Pos Belanja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, Kepala SKPD dan Eselon III wajib diajukan melalui Telaahan Staf dan disetujui oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan;
- (3) Setiap pengeluaran belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf PNS/Non PNS pada SKPD, wajib diajukan melalui Telaahan Staf oleh Kepala SKPD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Untuk perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf (non struktural/fungsional) yang dilakukan secara berombongan, proses pengajuan persetujuan telaahan staf dilakukan secara bersama dalam satu telaahan staf dengan mengikuti prosedur persetujuan telaahan staf bagi pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut;
- (5) Pengajuan telaahan staf dikecualikan apabila pengeluaran belanja perjalanan dinas didasarkan atas surat masuk yang telah didisposisi terlebih dahulu oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas Nama Kepala Daerah yang substansinya memerintahkan tindaklanjut atau melaksanakan materi surat tersebut;
- (6) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD yang difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II, III, IV, fungsional dan Staf yang anggarannya tersedia dalam DPA-SKPD, wajib dilengkapi dengan SPT dan SPPD;
- (2) SPT dan SPPD bagi Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah berhalangan ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah;
- (3) SPT dan SPPD bagi Pejabat eselon IIB, Eselon III dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau apabila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berhalangan didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
- (4) SPPD rampung bagi Pejabat Eselon II, Eselon III dan Fungsional ditandatangani Sekretaris Daerah dan dapat di delegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan yang membidangi, dan khusus di lingkungan SKPD ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing;
- (5) SPT dan SPPD bagi Pejabat Struktural lainnya dan Staf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD Eselon II yang menduduki jabatan setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
- (6) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Staf secara berombongan SPT dapat dibuat dalam satu SPT dengan mengikuti prosedur penandatanganan SPT bagi Pejabat yang memiliki eselonisasi tertinggi yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut;

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 12

Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah didukung dengan SPPD rampung yang dilengkapi dengan dokumen :

- a. Telaahan staf/surat permintaan/undangan, SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Bukti tiket dan/ *invoice* dari biro jasa perjalanan/travel sesuai penggunaan transportasi baik pesawat udara, kendaraan darat atau kendaraan laut, dan untuk penggunaan kendaraan dinas dokumen pembuktiannya adalah Nota SPBU atau Nota Pembelian BBM;

- c. Bukti biaya penginapan pembuktiannya adalah nota yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa perhotelan atau tempat menginap lainnya;
- d. Pertanggungjawaban penggunaan uang transpor ke bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal bus keberangkatan dan kepulangan dibuat dalam bukti pernyataan berupa daftar pengeluaran riil selama masa perjalanan sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Bupati ini;
- e. Diupayakan dilengkapi dengan dokumen visual pelaksanaan kegiatan dinas, baik oleh SKPD maupun DPRD;
- f. Laporan ringkas hasil pelaksanaan perjalanan dinas bagi perjalanan dinas non pemeriksaan, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan laporannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kemudian;

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN BELANJA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

Prinsip perhitungan pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut :

- a. Uang Harian dan dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. Uang Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas, uang makan dan uang saku;
- c. Lumpsum sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikat pada lamanya perjalanan dinas berdasarkan tiket berangkat dan tiket kembali;
- d. Pembayaran biaya tiket untuk perjalanan dinas luar daerah dihitung berdasarkan biaya riil/*at cost*, dengan batasan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. Biaya riil sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah nilai tertera pada tiket dan/atau *boarding pass*;
- f. Tiket yang dianggap sah sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah *tiket elektronik (e-tiket)*;
- g. Biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

- i. Sewa Kendaraan dalam Kota dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- j. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- k. Uang transport ke bandara/pelabuhan/stasiun/ terminal bus keberangkatan dan kepulangan dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost*;
- l. Untuk perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi yang menggunakan kendaraan darat/dinas atau angkutan lain selain pesawat udara, maka pembayaran biaya transportasi berdasarkan tiket darat, penggantian biaya bahan bakar minyak atau tiket lainnya yang dibayarkan berdasarkan biaya riil/*at cost*;

Pasal 14

Prinsip dan kebijakan pelaksanaan belanja perjalanan dinas meliputi :

- a. Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan membatasi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya diprioritaskan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan atau permintaan dari pemerintah dan atau kementerian atau lembaga pemerintah;
- c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi oleh pemerintah daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Daerah atau dalam rangka pelaksanaan perumusan kebijakan atau dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan, jumlah orang dalam melaksanakan perjalanan dinas dibatasi dan disesuaikan dengan tugas kedinasan atau fungsi organisasinya;
- d. Perjalanan dinas dalam rangka tugas konsultasi yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan DPRD dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah;

- e. Perjalanan dinas dalam rangka studi banding atau studi komparatif dapat dilakukan dengan ketentuan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- f. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan lain-lain atas undangan dari organisasi/lembaga selain instansi/lembaga pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah bila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan;
- g. Perjalanan dinas dalam rangka undangan diklat teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat atau Staf yang membidangi bidang teknis terkait, sedangkan undangan diklat fungsional teknis/umum diprioritaskan bagi Pejabat Teknis/Umum dan staf yang tidak menduduki jabatan Fungsional Teknis/Umum;

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pencairan belanja perjalanan dinas dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang atau SPT dan SPPD rampung telah ditandatangani.

Pasal 16

Setiap Pejabat atau Staf yang melaksanakan perjalanan dinas wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas tersebut mengenai hasil pelaksanaan perjalanan dinas dan menyertakan dokumen visual serta dapat mempresentasikan hasil pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dalam rapat kerja.

Pasal 17

- (1) SPPD rampung beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, melalui bendahara pengeluaran masing-masing SKPD wajib segera dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Bendahara Umum Daerah beserta pengeluaran/belanja lainnya;
- (2) Perjalanan dinas selanjutnya dapat dilakukan setelah SPPD rampung perjalanan dinas sebelumnya telah

dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Biaya perjalanan dinas setiap pejabat dan staf pada SKPD dibebankan pada DPA-SKPD dalam APBD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setaip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 1 April 2014

BUPATI BONE BOLANGO


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

Pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR

I. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango				
A. Uang Harian				
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Kec.Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Selatan, Suwawa Timur, Tapa, Bulango Selatan, Bulango Utara, Bulango Timur, Kabila, Tilongkabila, Botupingge, Kabila Bone)	Org/Hari	175.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
b Golongan III		Org/Hari	155.000,00	
c Golongan II		Org/Hari	145.000,00	
d Golongan I		Org/Hari	125.000,00	
e Honorer Daerah		Org/Hari	125.000,00	
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Ke Kec.Bulawa, Bone Raya, Bone, Bulango Ulu)	Org/Hari	225.000,00	
b Golongan III		Org/Hari	200.000,00	
c Golongan II		Org/Hari	185.000,00	
d Golongan I		Org/Hari	165.000,00	
e Honorer Daerah		Org/Hari	165.000,00	
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/ke Kec. Bulango Ulu)	Org/Hari	300.000,00	
b Golongan III		Org/Hari	275.000,00	
c Golongan II		Org/Hari	260.000,00	
d Golongan I		Org/Hari	240.000,00	
e Honorer Daerah		Org/Hari	240.000,00	
a Golongan IV	Dalam Wilayah Kabupaten Bone Bolango (Dari/Ke Suwawa Timur (Pinogu)	Org/Hari	750.000,00	
b Golongan III		Org/Hari	500.000,00	
c Golongan II		Org/Hari	400.000,00	
d Golongan I		Org/Hari	300.000,00	
e Honorer Daerah		Org/Hari	300.000,00	
B. Transport				
p Ke Kec. Bulango Ulu		Org/Ls	100.000,00	
q Suwawa - Desa Pinogu		Org/Ls	1.000.000,00	
2) Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo				
Tujuan Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo dan Kab. Gorontalo				
a Tingkat A	Bupati	Org/Hari	750.000,00	1. Biaya Perjalanan Terdiri dari : 1) Biaya Akomodasi 2) Uang Saku 2. Dibayarkan secara Lumpsum
b Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Org/Hari	500.000,00	
c Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	Org/Hari	400.000,00	
d Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD	Org/Hari	350.000,00	
e Tingkat E	Eselon III / Gol. IV	Org/Hari	300.000,00	

URAIAN		SPESIFIKASI		SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1		2		3	4	5
f	Tingkat F	Eselon IV / Gol. III		Org/Hari	250.000,00	
g	Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS		Org/Hari	200.000,00	
B. Tujuan Kab. Gorontalo Utara, Kab. Boalemo, dan Kab. Pohuwato						
a. Uang Harian						
1)	Tingkat A	Bupati		Org/Hari	1.250.000,00	Dibayarkan secara Lumpsum
2)	Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Org/Hari	1.000.000,00	
3)	Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD		Org/Hari	600.000,00	
4)	Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD		Org/Hari	500.000,00	
5)	Tingkat E	Eselon III / Gol. IV		Org/Hari	325.000,00	
6)	Tingkat F	Eselon IV / Gol. III		Org/Hari	300.000,00	
7)	Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS		Org/Hari	300.000,00	
b. Penginapan						
1)	Tingkat A	Bupati		Org/Hari	750.000,00	Dibayarkan secara at cost
2)	Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Org/Hari	500.000,00	
3)	Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD		Org/Hari	300.000,00	
4)	Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD		Org/Hari	250.000,00	
5)	Tingkat E	Eselon III / Gol. IV		Org/Hari	175.000,00	
6)	Tingkat F	Eselon IV / Gol. III		Org/Hari	150.000,00	
7)	Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS		Org/Hari	125.000,00	
c. Transport						
1)	Tingkat A	Bupati		Org/Ls	1.500.000,00	1. Biaya transport adalah biaya BBM 2. Dibayarkan secara at cost
2)	Tingkat B	Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Org/Ls	1.000.000,00	
3)	Tingkat C	Sekda dan Wakil Ketua DPRD		Org/Ls	750.000,00	
4)	Tingkat D	Eselon II dan Anggota DPRD		Org/Ls	500.000,00	
5)	Tingkat E	Eselon III / Gol. IV		Org/Ls	150.000,00	
6)	Tingkat F	Eselon IV / Gol. III		Org/Ls	150.000,00	
7)	Tingkat G	Staf Gol. II, I / Non PNS		Org/Ls	150.000,00	

BUPATI/BONE BOLANGO

HAMIM POU

II. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1) Uang Harian	2	3	4	5	6
1 Nanggroe Aceh Darussalam	A		Org/Hari	3.000.000,00	Uang harian dibayarkan secara Lumpsum
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
2 Sumatera Utara	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
3 Riau	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
4 Kepulauan Riau	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
5 Jambi	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
6 Sumatera Barat	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
7 Sumatera Selatan	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
8 Lampung	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
9 Bengkulu	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
10 Bangka Belitung	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
11 Banten	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
12 Jawa Barat	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
13 D.K.I. Jakarta	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
14 Jawa Tengah	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
15 D.I. Yogyakarta	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
16 Jawa Timur	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
17 Bali	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	3.000.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat	A		Org/Hari	3.500.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19 Nusa Tenggara Timur	B		Org/Hari	3.000.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
	A		Org/Hari	3.500.000,00	
20 Kalimantan Barat	B		Org/Hari	3.000.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	
21 Kalimantan Tengah	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	
22 Kalimantan Selatan	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	
23 Kalimantan Timur	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
	A		Org/Hari	3.000.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
24 Sulawesi Utara	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.520.000,00	
	D		Org/Hari	1.120.000,00	
	E		Org/Hari	900.000,00	
	F		Org/Hari	750.000,00	
	G		Org/Hari	600.000,00	
25 Gorontalo	A		Org/Hari		
	B		Org/Hari		
	C		Org/Hari		
	D		Org/Hari		
	E		Org/Hari		
	F		Org/Hari		
	G		Org/Hari		
26 Sulawesi Barat	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.520.000,00	
	D		Org/Hari	1.120.000,00	
	E		Org/Hari	900.000,00	
	F		Org/Hari	750.000,00	
	G		Org/Hari	600.000,00	
27 Sulawesi Selatan	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.520.000,00	
	D		Org/Hari	1.120.000,00	
	E		Org/Hari	900.000,00	
	F		Org/Hari	750.000,00	
	G		Org/Hari	600.000,00	
28 Sulawesi Tengah	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.520.000,00	
	D		Org/Hari	1.120.000,00	
	E		Org/Hari	900.000,00	
	F		Org/Hari	750.000,00	
	G		Org/Hari	600.000,00	
29 Sulawesi Tenggara	A		Org/Hari	3.000.000,00	
	B		Org/Hari	2.500.000,00	
	C		Org/Hari	1.520.000,00	
	D		Org/Hari	1.120.000,00	
	E		Org/Hari	900.000,00	
	F		Org/Hari	750.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
30 Maluku	G		Org/Hari	600.000,00	
	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	3.000.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
31 Maluku Utara	A		Org/Hari	3.500.000,00	
	B		Org/Hari	3.000.000,00	
	C		Org/Hari	1.900.000,00	
	D		Org/Hari	1.470.000,00	
	E		Org/Hari	1.050.000,00	
	F		Org/Hari	900.000,00	
	G		Org/Hari	800.000,00	
32 Papua	A		Org/Hari	4.000.000,00	
	B		Org/Hari	3.500.000,00	
	C		Org/Hari	2.500.000,00	
	D		Org/Hari	2.000.000,00	
	E		Org/Hari	1.500.000,00	
	F		Org/Hari	1.300.000,00	
	G		Org/Hari	1.000.000,00	
33 Papua Barat	A		Org/Hari	4.000.000,00	
	B		Org/Hari	3.500.000,00	
	C		Org/Hari	2.500.000,00	
	D		Org/Hari	2.000.000,00	
	E		Org/Hari	1.500.000,00	
	F		Org/Hari	1.300.000,00	
	G		Org/Hari	1.000.000,00	
2) Biaya Penginapan					
1 Nanggroe Aceh Darussalam	A		Org/Hari	1.500.000,00	Biaya penginapan dibayarkan secara <i>at cost</i>
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
2 Sumatera Utara	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
3 Riau	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
4 Kepulauan Riau	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
5 Jambi	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
6 Sumatera Barat	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
7 Sumatera Selatan	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
8 Lampung	A		Org/Hari	1.500.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
9 Bengkulu	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
10 Bangka Belitung	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
11 Banten	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
12 Jawa Barat	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
13 D.K.I. Jakarta	A		Org/Hari	2.000.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
14 Jawa Tengah	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
15 D.I. Yogyakarta	A		Org/Hari	2.000.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
16 Jawa Timur	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
17 Bali	A		Org/Hari	2.000.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	800.000,00	
	D		Org/Hari	800.000,00	
	E		Org/Hari	600.000,00	
	F		Org/Hari	400.000,00	
	G		Org/Hari	400.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
19 Nusa Tenggara Timur	A		Org/Hari	1.300.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	G		Org/Hari	325.000,00	
20 Kalimantan Barat	A		Org/Hari	1.300.000,00	
	B		Org/Hari	1.150.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
21 Kalimantan Tengah	A		Org/Hari	1.300.000,00	
	B		Org/Hari	1.200.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
22 Kalimantan Selatan	A		Org/Hari	1.420.000,00	
	B		Org/Hari	1.200.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
23 Kalimantan Timur	A		Org/Hari	1.420.000,00	
	B		Org/Hari	1.200.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
24 Sulawesi Utara	A		Org/Hari	1.350.000,00	
	B		Org/Hari	1.200.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
25 Gorontalo	A		Org/Hari	1.010.000,00	
	B		Org/Hari	910.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
26 Sulawesi Barat	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.200.000,00	
	B		Org/Hari	1.100.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
27 Sulawesi Selatan	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.350.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
28 Sulawesi Tengah	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.040.000,00	
	B		Org/Hari	850.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
29 Sulawesi Tenggara	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.040.000,00	
	B		Org/Hari	850.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
30 Maluku	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.200.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
31 Maluku Utara	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
	A		Org/Hari	1.350.000,00	
	B		Org/Hari	1.000.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
32 Papua	A		Org/Hari	1.300.000,00	
	B		Org/Hari	1.080.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
33 Papua Barat	A		Org/Hari	1.500.000,00	
	B		Org/Hari	1.300.000,00	
	C		Org/Hari	600.000,00	
	D		Org/Hari	600.000,00	
	E		Org/Hari	400.000,00	
	F		Org/Hari	325.000,00	
	G		Org/Hari	325.000,00	
3) Biaya Transport					
1 Nanggroe Aceh Darussalam	A	GTLO - CGK - NAD	Org/pp	11.820.000,00	1. Biaya Transport dibayarkan secara <i>at cost</i>
	B - G	GTLO - CGK - NAD	Org/pp	7.820.000,00	
2 Sumatera Utara	A	GTLO - CGK - MES	Org/pp	11.570.000,00	2. Tingkat Perjalanan Dinas A:
	B - G	GTLO - CGK - MES	Org/pp	6.870.000,00	Pesawat Udara Kelas Bisnis / Kereta Api / Bus Kelas Eksekutif / Airport Tax
3 Riau	A	GTLO - CGK - Riau	Org/pp	11.390.000,00	3. Tingkat Perjalanan Dinas B s/d G:
	B - G	GTLO - CGK - Riau	Org/pp	6.890.000,00	Pesawat Udara Kelas Ekonomi / Kapal Laut Kelas I B / Airport Tax
4 Kepulauan Riau	A	GTLO - CGK - Kepri	Org/pp	11.370.000,00	
	B - G	GTLO - CGK - Kepri	Org/pp	6.870.000,00	
5 Jambi	A	GTLO - CGK - Jambi	Org/pp	11.390.000,00	
	B - G	GTLO - CGK - Jambi	Org/pp	6.890.000,00	
6 Sumatera Barat	A	GTLO - CGK - Sumbar	Org/pp	11.300.000,00	
	B - G	GTLO - CGK - Sumbar	Org/pp	6.800.000,00	
7 Sumatera Selatan	A	GTLO - CGK - Sumsel	Org/pp	11.330.000,00	
	B - G	GTLO - CGK - Sumsel	Org/pp	6.830.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8 Lampung	A B - G	GTLO - CGK - Lampung GTLO - CGK - Lampung	Org/PP Org/PP	11.310.000,00 6.810.000,00	
9 Bengkulu	A B - G	GTLO - CGK - Bengkulu GTLO - CGK - Bengkulu	Org/PP Org/PP	11.370.000,00 6.870.000,00	
10 Bangka Belitung	A B - G	GTLO - CGK - Bgka Belitung GTLO - CGK - Bgka Belitung	Org/PP Org/PP	11.390.000,00 6.890.000,00	
11 Banten	A B - G	GTLO - CGK - Banten GTLO - CGK - Banten	Org/PP Org/PP	10.960.000,00 6.060.000,00	
12 Jawa Barat	A B - G	GTLO - CGK - BDJ GTLO - CGK - BDJ	Org/PP Org/PP	10.910.000,00 6.410.000,00	
13 D.K.I. Jakarta	A B - G	GTLO - CGK GTLO - CGK	Org/PP Org/PP	10.890.000,00 5.720.000,00	
14 Jawa Tengah	A B - G	GTLO - CGK - AMI GTLO - CGK - AMI	Org/PP Org/PP	11.170.000,00 6.420.000,00	
15 D.I. Yogyakarta	A B - G	GTLO - CGK - JOG GTLO - CGK - JOG	Org/PP Org/PP	11.400.000,00 6.400.000,00	
16 Jawa Timur	A B - G	GTLO - UPG - SUB GTLO - UPG - SUB	Org/PP Org/PP	11.330.000,00 6.330.000,00	
17 Bali	A B - G	GTLO - UPG - DPS GTLO - UPG - DPS	Org/PP Org/PP	10.830.000,00 6.830.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat	A B - G	GTLO - CGK - NTB GTLO - CGK - NTB	Org/PP Org/PP	11.940.000,00 6.940.000,00	
19 Nusa Tenggara Timur	A B - G	GTLO - CGK - NTT GTLO - CGK - NTT	Org/PP Org/PP	11.780.000,00 6.780.000,00	
20 Kalimantan Barat	A B - G	GTLO - UPG - Kalbar GTLO - UPG - Kalbar	Org/PP Org/PP	9.840.000,00 6.840.000,00	
21 Kalimantan Tengah	A B - G	GTLO - UPG - Kalteng GTLO - UPG - Kalteng	Org/PP Org/PP	9.870.000,00 6.870.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
22 Kalimantan Selatan	A B - G	GTLO - UPG - Kalsel GTLO - UPG - Kalsel	Org/pp Org/pp	9.820.000,00 6.820.000,00	
23 Kalimantan Timur	A B - G	GTLO - UPG - Kaltim GTLO - UPG - Kaltim	Org/pp Org/pp	9.450.000,00 6.450.000,00	
24 Sulawesi Utara	A B - G	GTLO - MDC GTLO - MDC	Org/pp Org/pp	2.340.000,00 1.840.000,00	
25 Gorontalo	A B - G		Org/pp Org/pp		
26 Sulawesi Barat	A B - G	GTLO - UPG - Sulbar GTLO - UPG - Sulbar	Org/pp Org/pp	4.870.000,00 3.870.000,00	
27 Sulawesi Selatan	A B - G	GTLO - UPG GTLO - UPG	Org/pp Org/pp	3.810.000,00 2.810.000,00	
28 Sulawesi Tengah	A B - G	GTLO - UPG - PLW GTLO - UPG - PLW	Org/pp Org/pp	4.930.000,00 3.930.000,00	
29 Sulawesi Tenggara	A B - G	GTLO - UPG - KDI GTLO - UPG - KDI	Org/pp Org/pp	4.820.000,00 3.820.000,00	
30 Maluku	A B - G	GTLO - UPG - Ambon GTLO - UPG - Ambon	Org/pp Org/pp	9.670.000,00 6.670.000,00	
31 Maluku Utara	A B - G	GTLO - UPG - Ternate GTLO - UPG - Ternate	Org/pp Org/pp	9.780.000,00 6.780.000,00	
32 Papua	A B - G	GTLO - UPG - Papua GTLO - UPG - Papua	Org/pp Org/pp	10.560.000,00 7.560.000,00	
33 Irian Jaya Barat	A B - G	GTLO - UPG - IJB GTLO - UPG - IJB	Org/pp Org/pp	10.780.000,00 7.780.000,00	
4) Transport Bandara-Hotel (PP)					
1 Nanggroe Aceh Darussalam	A B		Org Org	1.000.000,00 750.000,00	Biaya dibayarkan secara Lumpsum

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
2 Sumatera Utara	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
3 Riau	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
4 Kepulauan Riau	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
5 Jambi	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
6 Sumatera Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
7 Sumatera Selatan	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
8 Lampung	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
9 Bengkulu	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
10 Bangka Belitung	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
11 Banten	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
12 Jawa Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
13 D.K.I. Jakarta	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	1.000.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
14 Jawa Tengah	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
15 D.I. Yogyakarta	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
16 Jawa Timur	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
17 Bali	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	E - G		Org	400.000,00	
18 Nusa Tenggara Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
19 Nusa Tenggara Timur	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
20 Kalimantan Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
21 Kalimantan Tengah	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
22 Kalimantan Selatan	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
23 Kalimantan Timur	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
24 Sulawesi Utara	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
25 Gorontalo	A		Org		
	B		Org		
	C		Org		
	D		Org		
	E - G		Org		

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
26 Sulawesi Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
27 Sulawesi Selatan	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
28 Sulawesi Tengah	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
29 Sulawesi Tenggara	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
30 Maluku	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
31 Maluku Utara	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
32 Papua	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	
33 Irian Jaya Barat	A		Org	1.000.000,00	
	B		Org	750.000,00	
	C		Org	600.000,00	
	D		Org	500.000,00	
	E - G		Org	400.000,00	

URAIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	SPEKSIKASI	SATUAN	HARGA TERTINGGI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5) Uang Representatif <ul style="list-style-type: none">a Kepala Daerahb Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRDc Wakil Ketua DPRDd Sekretaris Daerahe Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	A B C C D		Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari Org/Hari	750.000,00 500.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00	Uang representatif hanya diperuntukan bagi tingkat perjalanan dinas A, B, C dan D.
6) Angkutan Dalam Kota/Sewa Kendaraan	A B		Org/Hari Org/Hari	750.000,00 500.000,00	Termasuk Sopir dan BBM (diberikan secara at cost).

Penjelasan Tingkat Perjalanan Dinas

1. Tingkat Perjalanan Dinas A, meliputi:
 - Kepala Daerah
2. Tingkat Perjalanan Dinas B, meliputi:
 - Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD
3. Tingkat Perjalanan Dinas C, meliputi:
 - Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD
4. Tingkat Perjalanan Dinas D, meliputi:
 - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD
5. Tingkat Perjalanan Dinas E, meliputi:
 - Pejabat Eselon III / Golongan IV
6. Tingkat Perjalanan Dinas F, meliputi:
 - Pejabat Eselon IV / Golongan III
7. Tingkat Perjalanan Dinas G, meliputi:
 - PNS Golongan II , I dan Non PNS

BUPATI BONE BOLANGO

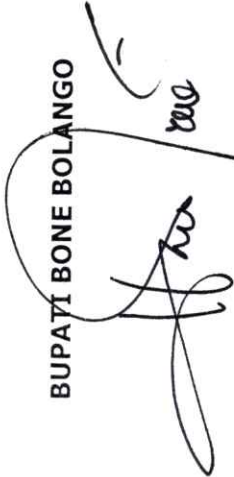
HAMIM POU

III. SATUAN HARIAN KOMPONEN PERJALANAN DINAS SEBAGIAN BIAYA DITANGGUNG/DIBEBAHKAN DALAM BIAYA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)		
		ESELON III/GOL IV	ESELON IV/GOL III	GOLONGAN II
1	2	3	4	5
1	Ke Ibukota Negara/Provinsi Luar Daerah Luar Sulawesi *)			
		200.000,00	200.000,00	200.000,00
		850.000,00	700.000,00	600.000,00
2	Ke Ibukota Provinsi di Sulawesi *)			
		150.000,00	150.000,00	150.000,00
		750.000,00	600.000,00	450.000,00

*) Dipilih komponen perjalanan dinas yang tidak tidak ditanggung/dibebankan dalam biaya kontribusi

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU